



Amanda Revisi 5
ID : 34e8e84751f023ee5a6c4137ec25f49c620c6210



File name : Amanda Revisi 5.txt	Submitter : UMSIDA Perpustakaan
Original file size : 224.25 KB	Submission date : June 12, 2026
Number of words : 6,687	Upload type : interface
Number of characters : 53295	analysis end date : June 12, 2026

Summary (section 1/3)

Location of suspect texts in the document :



Included in the suspicious text score :

Similarities 10%

Passages with similarities to sources found in different collections.



AI detection 6%

Texts with stylistically similar formulations to AI-generated text.
This rate is an indicator, not proof. Check with the author that he/she has mastered the knowledge mentioned in the document.



Unrecognized languages 4%

Passages in which some of the vocabulary used is not part of the language dictionary. This may be an attempt by the author to modify the text to make detection impossible.



Not included in the percentage of suspicious texts :

Texts between quotes 5%

Passages between quotation marks, often revealing a quotation.

Similarities

10%

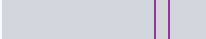
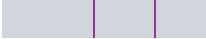
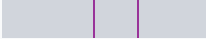
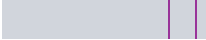
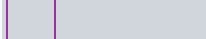
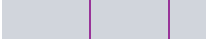
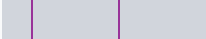
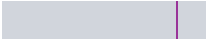
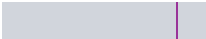
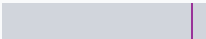
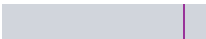
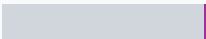
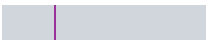
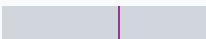
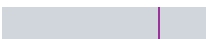
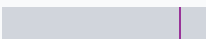
Passages with similarities to sources found in different collections.

Main source detected

No.	Description	Similarities	Locations
1	Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Menggunakan... doi.org/10.31004/riggs.v5i2.8694 ↗	5%	
2	ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI PADA... dx.doi.org/10.36908/esha.v5i2.122 ↗	5%	
3	ejournal.amirulbangunbangsapublishing.com ejournal.amirulbangunbangsapublishing.com/index.php/JAN/article/view/387 ↗	4%	
4	Pengaruh Beban Kerja, Gaya Kepemimpinan dan Kedisiplinan Terhadap... dx.doi.org/10.59422/lbm.v1i04.85 ↗	1%	
5	ejournal3.undip.ac.id ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/download/36386/27986 ↗	<1%	
6	Document from another user #d9a029 Comes from another group	<1%	
16	jurnal.itsm.ac.id jurnal.itsm.ac.id/index.php/emba/article/view/941 ↗	<1%	
18	comserva.publikasiindonesia.id comserva.publikasiindonesia.id/index.php/comserva/article/download/3082/2474/... ↗	<1%	
19	(PDF) Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa dan Tingkat Pendidikan... www.academia.edu/129424171/Pengaruh_Kompetensi_Aparatur_Desa_dan_Tingka... ↗	<1%	

Source with incidental similarities

No.	Description	Similarities	Locations
7	DETERMINAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN... doi.org/10.33059/jmas.v5i5.10925 ↗	<1%	
8	ARTIKEL DIANA BAB 1-5 REV 1 #28ca7a Comes from my group	<1%	
9	Analisis Dampak Kepemimpinan Dan Komunikasi Terhadap Kinerja... doi.org/10.31004/riggs.v4i2.965 ↗	<1%	

No.		Description	Similarities	Locations
10		PERAN KEPEMIMPINAN UNTUK MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI YANG... doi.org/10.60145/jcp.v2i3.397 ↗	<1%	
11		Document from another user #68bdd9 📁 Comes from another group	<1%	
12		Document from another user #36434a 📁 Comes from another group	<1%	
13		(PDF) Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Komunikasi Internal dan Motivasi... www.academia.edu/88941625/Pengaruh_Gaya_Kepemimpinan_Komunikasi_Inter... ↗	<1%	
14		JURNAL ACCOPEN #4262ea 📁 Comes from my group	<1%	
15		DETERMINAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KECAMATAN... doi.org/10.33059/jmas.v6i2.10916 ↗	<1%	
17		media.neliti.com media.neliti.com/media/publications/631589-pengaruh-persepsi-kemudahan-ling... ↗	<1%	
20		media.neliti.com media.neliti.com/media/publications/245984-pengaruh-pendapatan-asli-daerah-d... ↗	<1%	
21		repository.unpad.ac.id repository.unpad.ac.id/thesis/120410/2018/120410180016_4_2956.pdf ↗	<1%	
22		PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal, SILPA dan Kinerja Keuangan... dx.doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i05.p06 ↗	<1%	
23		Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Desa, dan Integritas Terhadap... doi.org/10.35870/jemsi.v10i5.3086 ↗	<1%	
24		Document from another user #50211b 📁 Comes from another group	<1%	
25		Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa dan Tingkat Pendidikan Terhadap... doi.org/10.47467/alkharaj.v7i5.7156 ↗	<1%	
26		Document from another user #0c1b3d 📁 Comes from another group	<1%	
27		The Influence of Good Governance Principles on Financial Management o... doi.org/10.57250/ajsh.v5i3.2023 ↗	<1%	
28		Document from another user #9a6803 📁 Comes from another group	<1%	
29		KINERJA APARATUR PENGELOLAAN DANA DESA (Studi pada Desa di... doi.org/10.33059/jmas.v5i5.10782 ↗	<1%	

Referenced source (without similarities detected)

No.		Description
1		https://kemendesa.go.id/berita/view/detil/5704/kemendes-prioritas
2		https://ejournal-binainsani.ac.id/index.php/JAK/article/view/3438



Pengaruh Pola Komunikasi Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Tingkat Pendidikan Sebagai Variabel Moderasi di Kecamatan Beji

The Effect of Communication Patterns and Leadership Style on Financial Performance with Education Level as a Moderating Variable in Beji District

Amanda Aprilya Firdaus

222010300100

Drs. Ec. Akhmad Mulyadi, M.S.A.

0008097301

SKRIPSI

Program Studi Akuntansi

Fakultas Bisnis, Hukum & Ilmu Sosial

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

2026

Pengaruh Pola Komunikasi Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Tingkat Pendidikan Sebagai Variabel Moderasi di Kecamatan Beji

The Effect of Communication Patterns and Leadership Style on Financial Performance with Education Level as a Moderating Variable in Beji District

Amanda Aprilya Firdaus¹⁾, Akhmad Mulyadi²⁾

1) Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

2) Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: akhmadmulyadi@umsida.ac.id

I. PENDAHULUAN

Keuangan pemerintah desa merupakan sistem pengelolaan yang mengatur pendapatan dan belanja desa agar dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengatur serta mengelola keuangannya sendiri, termasuk Dana Desa yang bersumber dari pemerintah pusat. Sebelum diberlakukannya regulasi tersebut, pemerintah desa masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pemerintah daerah. Kinerja keuangan pemerintah desa menggambarkan tingkat keberhasilan desa dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam satu periode anggaran. Penilaian terhadap kinerja keuangan umumnya dilihat dari aspek produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, dan akuntabilitas [1]. Dalam pengelolaan Dana Desa, kinerja keuangan juga menunjukkan kemampuan pemerintah desa dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan secara transparan, tepat waktu, serta sesuai standar akuntansi guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat [2].

Secara umum, kinerja keuangan menjadi salah satu indikator utama untuk menilai kondisi suatu organisasi. Oleh sebab itu, pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan berdasarkan regulasi yang berlaku agar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan merupakan norma hukum tertulis yang mengikat dan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa [3]. Namun demikian, keberadaan regulasi belum tentu secara langsung mampu meningkatkan kinerja keuangan pemerintah desa. Kondisi tersebut disebabkan karena aparatur desa masih mengalami kesulitan dalam memahami dan menerapkan berbagai aturan yang ada, baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Akibatnya, pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur desa belum berjalan secara optimal sehingga berdampak negative pada pengelolaan dan kinerja keuangan desa.

Fenomena yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah desa masih menghadapi berbagai permasalahan, khususnya dalam pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa. Permasalahan tersebut antara lain berupa kesulitan aparatur desa dalam menyusun laporan keuangan sesuai standar, keterlambatan penyampaian laporan, serta keterbatasan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, pengeluaran belanja modal di daerah juga belum sepenuhnya mampu meningkatkan pendapatan secara optimal [4]. Kondisi tersebut menyebabkan pengelolaan Dana Desa belum berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel meskipun jumlah alokasi dana terus mengalami peningkatan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kenaikan alokasi Dana Desa dari waktu ke waktu belum sepenuhnya diiringi oleh kapasitas pengelolaan keuangan yang memadai di tingkat desa. Apabila merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa semestinya dijalankan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Akan tetapi, pada pelaksanaannya masih tampak adanya kesenjangan antara aturan dan praktik di lapangan. Hal ini tercermin dari belum maksimalnya penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan masih lemahnya mekanisme pengawasan, sehingga kesalahan administrasi maupun potensi penyimpangan sering kali baru terungkap setelah dilakukan pemeriksaan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan Dana Desa masih belum berjalan secara optimal sesuai dengan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Permasalahan ini perlu mendapat perhatian karena pelaksanaan prioritas Dana Desa tahun 2025 menuntut adanya pengelolaan keuangan desa yang dilakukan secara lebih profesional. Keberhasilan berbagai program, khususnya yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan, sangat dipengaruhi oleh kualitas kinerja keuangan pemerintah desa. Dalam konteks tersebut, pola komunikasi yang diterapkan dalam organisasi serta gaya kepemimpinan kepala desa diperkirakan turut berperan dalam menentukan kemampuan aparatur desa dalam mengelola keuangan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, tingkat pendidikan aparatur desa juga memiliki peran penting dalam memahami peraturan, menerima arahan, serta melaksanakan administrasi keuangan desa secara tepat [5].

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah desa masih belum optimal dalam mengelola dana publik secara profesional. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas, sehingga semakin baik laporan keuangan yang disusun maka semakin baik pula pertanggungjawabannya. Penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan desa menjadi hal yang penting untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Setelah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diberlakukan, desa diberikan kewenangan yang lebih besar dalam mengelola Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD). Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal karena masih terdapat sejumlah permasalahan, seperti keterbatasan kompetensi aparatur desa, keterlambatan pencairan dana, serta rendahnya tingkat transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Padahal, pengelolaan yang terbuka dan akuntabel sangat diperlukan guna mendukung pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat [6]. Oleh karena itu, kinerja keuangan pemerintah desa menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan penerapan prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan desa [7].

Salah satu faktor yang diduga memengaruhi kinerja keuangan pemerintah desa adalah pola komunikasi organisasi. Komunikasi yang berlangsung secara terbuka dan dua arah antara kepala desa dengan aparatur desa dapat meningkatkan koordinasi kerja serta meminimalkan kesalahan dalam pelaksanaan tugas. Dengan komunikasi yang efektif, proses pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dapat berjalan lebih terarah dan tertib sehingga dapat mengurangi terjadinya kesalahan administrasi. Sebaliknya, pola komunikasi yang kurang efektif dapat menghambat kinerja aparatur desa. Menurut penelitian lain, komunikasi merupakan proses penyampaian pesan, informasi, gagasan, maupun ide dari satu pihak kepada pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat memengaruhi sikap dan perilaku seseorang. Komunikasi juga berperan dalam meningkatkan motivasi kerja dengan memberikan pemahaman mengenai tugas, pencapaian kerja, dan upaya perbaikan terhadap kinerja yang belum optimal [8]. Komunikasi satu arah dan terbatas sangat berdampak terhadap degradasi kinerja karyawan dalam suatu organisasi, informasi tidak tersampaikan dengan jelas sehingga karyawan tidak memahami tugas atau tanggung jawab mereka dengan baik [9].

Selain komunikasi, gaya kepemimpinan kepala desa merupakan faktor penting yang memengaruhi kinerja aparatur desa. Gaya kepemimpinan yang partisipatif dan komunikatif mampu menciptakan suasana kerja yang

kondusif, serta meningkatkan motivasi dan efektivitas kerja aparatur. Kepala desa yang tegas akan lebih mudah mengarahkan dan mengawasi aparatur dalam pengelolaan keuangan desa agar tetap disiplin dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemimpin yang mampu memberikan pesan baik dan arahan yang jelas berperan besar dalam meningkatkan kinerja organisasi. Kepemimpinan memiliki peran strategis karena dapat mempengaruhi perilaku pegawai yang dipimpinnya. Kemampuan pemimpin dalam menyesuaikan diri dengan dinamika pembangunan juga menjadi faktor penting dalam mewujudkan tujuan organisasi yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan mendukung percepatan pembangunan desa. Kepemimpinan dapat dipahami sebagai kemampuan seseorang untuk memengaruhi dan menggerakkan orang lain agar bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu [10]. Jika pimpinan tidak mempunyai kompetensi memimpin, maka tugas-tugasnya tidak mampu dilaksanakan dengan baik. Sebuah organisasi memerlukan pemimpin yang efektif, yang memiliki keahlian mempengaruhi sikap anak buahnya. Tanpa adanya pimpinan, kegiatan perusahaan mungkin tidak akan berjalan. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya pencapaian tujuan perusahaan [11].

Kemampuan aparatur desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan tidak terlepas dari tingkat pendidikan yang dimiliki. Aparatur dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi umumnya memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap peraturan, lebih mudah menerima arahan, serta mampu menjalankan tugas secara lebih efektif. Kondisi tersebut menjadikan tingkat pendidikan sebagai salah satu aspek yang dapat mendukung peningkatan kualitas kinerja aparatur, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa. Semakin tinggi pendidikan yang dimiliki seseorang, semakin luas pula pengetahuan dan kompetensi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan secara profesional. Persyaratan mengenai tingkat pendidikan perangkat desa juga telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 50 ayat (1), yang menetapkan bahwa perangkat desa sekurang-kurangnya memiliki pendidikan setingkat sekolah menengah atas atau yang sederajat [12].

Dalam penelitian ini, fungsi tingkat pendidikan sebagai variabel pemoderasi dijelaskan melalui pendekatan contingency theory. Teori tersebut menjelaskan bahwa hubungan antarvariabel dalam organisasi tidak selalu berlaku secara tetap, melainkan dipengaruhi oleh kondisi tertentu yang melingkupinya. Oleh karena itu, keberadaan variabel moderasi diperlukan untuk menjelaskan keadaan yang dapat memperkuat maupun memperlemah pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Dalam konteks penelitian ini, tingkat pendidikan aparatur desa dipandang sebagai faktor situasional yang dapat memengaruhi efektivitas pola komunikasi dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja keuangan pemerintah desa. Selain itu, teori tersebut juga membuka kemungkinan adanya faktor-faktor lain yang dapat berperan sebagai variabel pemoderasi dalam hubungan kinerja organisasi.

Penelitian ini juga didasarkan pada agency theory yang menjelaskan hubungan antara principal dan agent. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, masyarakat bertindak sebagai principal yang memberikan kepercayaan kepada pemerintah desa sebagai agent untuk mengelola keuangan dan sumber daya desa. Hubungan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan informasi dan konflik kepentingan karena pemerintah desa memiliki akses informasi yang lebih besar dibandingkan masyarakat. Oleh sebab itu, penerapan transparansi dan akuntabilitas menjadi penting sebagai upaya pengendalian. Komunikasi yang berjalan secara efektif serta kepemimpinan yang baik diharapkan mampu mengurangi kesenjangan informasi sehingga pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Di samping itu, tingkat pendidikan aparatur desa turut mendukung efektivitas pengendalian tersebut sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja keuangan pemerintah desa.

Kinerja organisasi pada dasarnya dipengaruhi oleh perilaku individu serta pola interaksi yang terjadi di dalam organisasi. Oleh karena itu, komunikasi yang berlangsung secara terbuka dapat mendukung koordinasi antaraparat serta meminimalkan terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan. Selain itu, penerapan gaya kepemimpinan yang partisipatif mampu meningkatkan motivasi kerja sekaligus menciptakan suasana kerja yang kondusif. Dalam konteks ini, kualitas sumber daya manusia, terutama tingkat pendidikan, berperan sebagai variabel pemoderasi yang dapat memperkuat pengaruh komunikasi dan kepemimpinan terhadap kinerja organisasi. Sinergi antara komunikasi, kepemimpinan, dan tingkat pendidikan menjadi aspek yang penting dalam upaya meningkatkan kinerja keuangan pemerintah desa.

Penelitian ini dilaksanakan pada pemerintah desa di Kecamatan Beji mengingat desa memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan dana publik. Namun, dalam pelaksanaannya masih dijumpai berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pelaporan maupun pengelolaan keuangan desa. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan tingkat pendidikan sebagai variabel moderasi dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah desa. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah desa dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Apakah pola komunikasi berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah desa?

Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah desa?

Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah desa?

Apakah tingkat pendidikan memoderasi pengaruh pola komunikasi terhadap kinerja keuangan pemerintah desa?

Apakah tingkat pendidikan memoderasi pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja keuangan pemerintah desa?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan penelitian ini adalah:

Untuk menganalisis pengaruh pola komunikasi terhadap kinerja keuangan pemerintah desa di Kecamatan Beji.

Untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja keuangan pemerintah desa di Kecamatan Beji.

Untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap kinerja keuangan pemerintah desa di Kecamatan Beji.

Untuk menganalisis peran tingkat pendidikan dalam memoderasi pengaruh pola komunikasi terhadap kinerja keuangan pemerintah desa di Kecamatan Beji.

Untuk menganalisis peran tingkat pendidikan dalam memoderasi pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja keuangan pemerintah desa di Kecamatan Beji

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pola Komunikasi terhadap Kinerja keuangan pemerintah desa

Pola komunikasi dalam organisasi pemerintahan desa memiliki peran penting dalam menentukan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur desa. Komunikasi yang efektif memungkinkan terjadinya pertukaran informasi yang jelas, tepat, dan dua arah antara pimpinan dan aparatur desa, sehingga menciptakan kesamaan pemahaman mengenai tujuan, kebijakan, serta pembagian tugas. Dalam konteks pemerintahan desa, pola komunikasi yang terbuka dan partisipatif terbukti mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja desa, pola komunikasi organisasi yang efektif berpotensi meningkatkan kinerja keuangan pemerintah desa. Penelitian lain juga menemukan bahwa komunikasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja aparatur desa, yang secara tidak langsung berdampak pada kinerja keuangan desa. Dalam Teori Agensi, komunikasi yang jelas dan dua arah diperlukan untuk mengurangi asimetri informasi serta memastikan aparatur menjalankan tugas sesuai tujuan organisasi [13].

Dari sudut pandang agency theory, komunikasi yang efektif juga mampu menekan terjadinya asimetri informasi serta mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, semakin baik pola komunikasi yang diterapkan, maka semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah desa. Selain itu, pola komunikasi yang efektif terbukti mendukung keberhasilan pelaksanaan program alokasi dana desa serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa [14].

H1: Pola komunikasi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah desa.

Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa

Gaya kepemimpinan mencerminkan cara seorang pemimpin dalam memengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam pemerintahan desa, kepala desa memiliki peran strategis dalam

menentukan arah kebijakan serta menciptakan iklim kerja yang kondusif. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur desa maupun ASN. Selain itu, kepemimpinan yang efektif apabila didukung komunikasi yang baik akan memberikan pengaruh simultan terhadap peningkatan kinerja organisasi sektor publik. Oleh karena itu, gaya kepemimpinan yang tepat diyakini mampu meningkatkan kinerja keuangan pemerintah desa secara keseluruhan [15]. Selain itu, gaya kepemimpinan juga terbukti memengaruhi kinerja keuangan dalam organisasi ekonomi seperti koperasi. Dalam konteks pemerintahan desa, gaya kepemimpinan kepala desa berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparatur desa, yang secara langsung berkaitan dengan kualitas pengelolaan keuangan desa. Secara teoretis, hal ini dijelaskan dalam teori kepemimpinan yang menyatakan bahwa pemimpin yang mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan arahan yang jelas akan mendorong peningkatan kinerja bawahan. Oleh karena itu, semakin baik gaya kepemimpinan yang diterapkan, maka semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah desa [10].

H2: Gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah desa.

Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kinerja Pemerintahan Desa

Tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor yang berperan dalam menentukan kualitas kinerja aparatur pemerintah desa. Aparatur yang memiliki jenjang pendidikan lebih tinggi umumnya mempunyai kemampuan teknis, daya analisis, serta keterampilan komunikasi yang lebih baik sehingga mampu menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab. Selain itu, tingkat pendidikan yang lebih tinggi juga dapat meningkatkan pemahaman terhadap berbagai kebijakan dan regulasi yang berlaku, sehingga mendukung terciptanya pengelolaan pemerintahan desa yang lebih berkualitas. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa komunikasi dan tingkat pendidikan secara bersama-sama mampu meningkatkan kinerja aparatur desa. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki aparatur desa, maka semakin baik pula kualitas kinerja yang dihasilkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Temuan penelitian lainnya juga mengungkapkan bahwa latar belakang

pendidikan memberikan pengaruh positif terhadap kinerja aparatur desa. Hubungan tersebut dapat dijelaskan melalui Human Capital Theory yang menyatakan bahwa pendidikan berperan dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan individu, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kinerja. Oleh karena itu, peningkatan tingkat pendidikan aparatur desa akan mendukung terciptanya kinerja pemerintahan desa yang lebih baik. [11].

H3: Tingkat pendidikan memoderasi pengaruh pola komunikasi terhadap kinerja keuangan pemerintah desa.

Peran Tingkat Pendidikan sebagai Variabel Moderasi pada Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa

Selain memoderasi pengaruh pola komunikasi, tingkat pendidikan juga diduga mampu memperkuat hubungan antara gaya kepemimpinan dengan kinerja keuangan pemerintah desa. Aparatur desa yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi umumnya lebih mudah menyesuaikan diri dengan gaya kepemimpinan partisipatif maupun transformasional, sehingga arahan yang diberikan pimpinan dapat diterima dan dijalankan secara lebih efektif. Penelitian mengenai pengelolaan APBDes menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dapat memperkuat pengaruh faktor tata kelola terhadap pengelolaan keuangan desa. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa kapasitas pendidikan aparatur desa memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas kepemimpinan guna meningkatkan kinerja keuangan desa. Selain itu, penelitian lain menjelaskan bahwa kepemimpinan dapat berfungsi sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara faktor organisasi dengan kinerja keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik individu, termasuk tingkat pendidikan, turut menentukan tingkat efektivitas kepemimpinan dalam meningkatkan kinerja organisasi. Dengan demikian, tingkat pendidikan tidak hanya memberikan pengaruh secara langsung terhadap kinerja, tetapi juga berfungsi sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja keuangan pemerintah desa. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan pimpinan mampu memperkuat hubungan antara strategi organisasi dengan kinerja keuangan [16].

H4: Tingkat pendidikan memoderasi pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja keuangan pemerintah desa

Pola Komunikasi
(X1)
Gaya Kepemimpinan
(X2)
Kinerja Keuangan Pemerintahan Desa
(Y)

Tingkat Pendidikan
(Z)

Pola Komunikasi
(X1)
Gaya Kepemimpinan
(X2)
Kinerja Keuangan Pemerintahan Desa
(Y)

Tingkat Pendidikan
(Z)

Gambar 1. Kerangka Konseptual

II.METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori dengan metode survei melalui kuesioner berskala Likert. Pendekatan eksplanatori adalah penelitian yang bertujuan menjelaskan hubungan sebab-akibat antar variabel melalui pengujian hipotesis Pendekatan kuantitatif eksplanatori bertujuan untuk menunjukkan hubungan sebab-akibat antarvariabel melalui pengujian hipotesis dan analisis statistic [14]. Pada dasarnya, pendekatan ini digunakan untuk menguji pengaruh pola komunikasi (X1) dan gaya kepemimpinan (X2) terhadap kinerja keuangan pemerintah desa (Y), dengan tingkat pendidikan (Z) sebagai variabel moderasi. Data yang diperoleh menggunakan analisis dengan cara statistik untuk memberikan bukti empiris mengenai hubungan dan pengaruh antarvariabel penelitian [17].

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa skor hasil pengisian kuesioner oleh responden terhadap indikator variabel penelitian. Data ini digunakan untuk mengukur pola komunikasi, gaya kepemimpinan, tingkat pendidikan, dan kinerja keuangan pemerintah desa secara terstruktur . Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder [18]. Data primer diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner karena mampu memberikan informasi yang sesuai dengan variabel penelitian. Data sekunder diperoleh dari dokumen pendukung seperti struktur organisasi desa, data aparatur desa, serta profil desa di Kecamatan Beji untuk memperkuat deskripsi objek penelitian dan mendukung kebutuhan informasi populasi.

Populasi

Penentuan populasi merupakan tahap penting dalam penelitian karena berkaitan dengan kualitas data yang akan diperoleh. Menurut Sugiyono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah seluruh aparatur pemerintah desa di Kecamatan Beji, karena aparatur desa merupakan pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa [19].

Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan dan karakteristik tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik ini digunakan karena tidak seluruh anggota populasi memiliki keterkaitan langsung dengan variabel yang diteliti, khususnya terkait pola komunikasi, gaya kepemimpinan, tingkat pendidikan, dan kinerja keuangan pemerintah desa. Oleh karena itu, responden dalam penelitian ini dipilih dari aparatur desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan administrasi dan keuangan desa, seperti kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, kaur perencanaan, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) [20].

Jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan menggunakan rumus Lameshow karena jumlah populasi belum diketahui secara pasti. Rumus ini digunakan untuk menentukan ukuran sampel dengan tingkat kesalahan tertentu agar sampel dapat mewakili populasi penelitian . Rumus Lameshow adalah sebagai berikut:

Dimana:

n = jumlah sampel

Z = nilai standar normal pada tingkat kepercayaan 95% (1,96)

p = estimasi proporsi populasi (0,5)

d = tingkat kesalahan (0,10)

Perhitungan sampel menggunakan rumus Lameshow adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, jumlah sampel dalam penelitian ini dibulatkan menjadi 100 responden.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penentuan lokasi penelitian dilakukan melalui pertimbangan berbagai faktor, antara lain biaya, tingkat aksesibilitas, dan tujuan strategis agar diperoleh lokasi yang paling tepat untuk mendukung kegiatan penelitian. Kecamatan Beji dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki kesesuaian dengan fokus dan sasaran penelitian, yaitu aparatur pemerintah desa yang berperan langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Adapun aspek yang menjadi perhatian dalam penelitian ini meliputi inspeksi, pendelegasian wewenang, pengendalian internal, dan kinerja keuangan pemerintah desa. Pelaksanaan penelitian berlangsung selama satu bulan yang mencakup tahapan persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, hingga analisis data, sehingga seluruh rangkaian penelitian dapat terlaksana secara sistematis [21].

Identifikasi dan Indikator Variabel

Definisi operasional diperlukan agar setiap variabel dalam penelitian dapat diukur secara jelas dan konsisten. Penelitian ini memiliki empat variabel, yaitu pola komunikasi (X1), gaya kepemimpinan (X2), tingkat pendidikan (Z), dan kinerja pemerintah desa (Y).

Tabel 1. Indikator dan Variabel

Variabel Definisi Konseptual

Indikator Skala

Pola Komunikasi (X1) Pola komunikasi adalah cara aliran informasi dan pertukaran pesan yang terjadi dalam organisasi desa antara pimpinan dan perangkat maupun antar perangkat, yang berfungsi untuk memperlancar koordinasi kerja dan mengurangi kesalahan pelaksanaan tugas [14]. 1) Komunikasi vertikal (komunikasi antara atasan dan bawahan) 2) Komunikasi horizontal (komunikasi antar pegawai yang setara) 3) Komunikasi dua arah 4) Kejelasan informasi 5) Ketepatan penyampaian informasi Likert 1-5

Gaya Kepemimpinan (X2) Gaya kepemimpinan adalah pola perilaku yang digunakan kepala desa dalam memengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi perangkat desa untuk mencapai tujuan organisasi, yang tercermin dari cara pemimpin mengambil keputusan, memberi arahan, dan melibatkan bawahan [22]. 1) Partisipatif (bawahan ikut mengambil keputusan) 2) Delegatif (tugas diserahkan kepada bawahan) 3) Direktif (pemimpin memberi instruksi tegas) Likert 1-5

Tingkat Pendidikan (Z) Tingkat pendidikan adalah jenjang pendidikan formal tertinggi yang telah diselesaikan oleh perangkat desa yang menunjukkan kapasitas pengetahuan dan kemampuan dasar individu dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan desa [23]. 1) Kesesuaian pendidikan dengan pekerjaan 2) Pemahaman regulasi (kemampuan memahami aturan yang berlaku) 3) Kemampuan administrasi (kemampuan mengelola dokumen dan laporan kerja) Ordinal

Kinerja Keuangan Pemerintah Desa (Y) Kinerja keuangan pemerintah desa adalah tingkat keberhasilan pemerintah desa dalam merencanakan, merealisasikan, dan menggunakan anggaran desa secara tepat, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan pengelolaan keuangan desa [24]. 1. Ketepatan penyusunan anggaran 2. Realisasi anggaran sesuai perencanaan 3. Efisiensi penggunaan anggaran Likert 1-5

Sumber : diringkaskan oleh penulis

Teknik Analisis Data

Penelitian ini mengadopsi teknik analisis data berbasis Partial Least Square (PLS). PLS dapat mendeskripsikan hubungan antar variabel dan dapat dianalisis dalam sekali pengujian. Peneliti menggunakan PLS karena pada penelitian ini menggunakan variabel laten yang diukur dengan indikatornya. Sehingga memungkinkan peneliti untuk menganalisisnya menggunakan perhitungan yang jelas dan detail. Evaluasi model PLS dilakukan dengan mengevaluasi model pengukuran (outer model) dan model struktural (inner model) [25].

1. Pengujian Model Pengukuran (Outer Model)

a. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana indikator mampu mengukur variabel yang diteliti secara

tepat. Pengujian validitas pada penelitian ini menggunakan convergent validity dan discriminant validity.

Convergent validity dinilai berdasarkan nilai loading factor dan Average Variance Extracted (AVE). Suatu indikator dinyatakan valid apabila memiliki nilai loading factor di atas 0,70 dan nilai AVE lebih dari 0,50. Nilai tersebut menunjukkan bahwa indikator mampu menjelaskan variabel yang diukur dengan baik. Selain itu, pengujian discriminant validity dilakukan untuk memastikan bahwa setiap variabel memiliki karakteristik yang berbeda dengan variabel lainnya. Pengujian ini dilihat dari nilai akar kuadrat AVE yang harus lebih besar dibandingkan korelasi antar variabel penelitian.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui tingkat konsistensi jawaban responden terhadap indikator penelitian. Pengujian reliabilitas dilakukan menggunakan nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability. Suatu variabel dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability lebih dari 0,70. Nilai tersebut menunjukkan bahwa indikator yang digunakan mampu memberikan hasil pengukuran yang konsisten.

2. Pengujian Model Struktural (Inner Model)

a. Uji R-Square (Coefficient of Determination)

Uji R-Square digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Semakin tinggi nilai R-Square, maka semakin besar kemampuan variabel pola komunikasi dan gaya kepemimpinan dalam menjelaskan kinerja keuangan pemerintah desa. Nilai R-Square sebesar 0,67 menunjukkan kategori kuat, nilai 0,33 menunjukkan kategori sedang, sedangkan nilai 0,19 menunjukkan kategori lemah.

b. Uji Path Coefficient

Pengujian path coefficient dilakukan untuk mengetahui arah dan besarnya pengaruh antar variabel penelitian. Pengujian ini dilakukan melalui proses bootstrapping pada SmartPLS dengan melihat nilai T-statistics dan P-values. Hipotesis penelitian dinyatakan diterima apabila nilai T-statistics lebih besar dari 1,96 dan nilai P-values lebih kecil dari 0,05. Pengujian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh pola komunikasi dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja keuangan pemerintah desa.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Pengujian Model Pengukuran (Outer Model)

Evaluasi terhadap model pengukuran (outer model) dilakukan untuk menilai validitas dan reliabilitas dari masing-masing konstruk (variabel). Berikut disajikan hasil penilaian terhadap Outer Model atau Measurement Model:

Gambar 2. Outer Model atau Measurement Model

Sumber: Pengolahan data primer (kuesioner), 2025

Hasil pemodelan menggunakan SmartPLS yang ditampilkan pada Gambar 2 menunjukkan bahwa seluruh indikator pada variabel pola komunikasi (X1), gaya kepemimpinan (X2), kinerja keuangan (Y), dan tingkat pendidikan (Z) memiliki nilai outer loading di atas 0,50. Dengan demikian, tidak terdapat indikator yang berada di bawah batas nilai tersebut, yang mengindikasikan bahwa seluruh indikator memenuhi syarat validitas konvergen.

Hasil Uji Validitas Convergent dan Discriminant

Nilai Average Variance Extracted (AVE) diperoleh dari hasil estimasi model outer menggunakan SmartPLS. Data berikut menunjukkan nilai AVE yang mengacu pada loading factor dengan nilai di atas 0,50.

Tabel 2. Average Variance Extracted (AVE)

Variabel AVE Keterangan

X1 0,973 Valid

X2 0,945 Valid

Y 0,846 Valid

Z 0,975 Valid

Sumber: Pengolahan data primer (kuesioner), 2025

Tabel 2 menyajikan nilai Average Variance Extracted (AVE) untuk variabel pola komunikasi (X1), gaya kepemimpinan (X2), kinerja keuangan (Y), dan tingkat pendidikan (Z). Setiap konstruk menunjukkan nilai AVE yang melebihi 0,50, yang menandakan bahwa masing-masing konstruk memiliki validitas yang baik berdasarkan indikator kuesioner yang digunakan. Oleh karena itu, seluruh konstruk dalam penelitian ini dianggap memenuhi kriteria validitas. Model indikator yang digunakan adalah model reflektif, di mana hubungan antar variabel direpresentasikan melalui koefisien korelasi.

Tabel 3. Correlation of Laten Variabels (Discriminant Validity)

Variabel X1 Y X2 Z

X1 0,986

X2 0,496 0,972

Y 0,269 0,441 0,920

Z -0,005 0,013 -0,142 0,987

Sumber: Pengolahan data primer (kuesioner), 2025

Pada Tabel 3 diperoleh hasil data fornell dan larcker dimana kriteria tersebut yaitu nilai akar AVE (Garis Melintang) variabel > korelasi antar variabel. Terdapat nilai akar AVE literasi keuangan sebesar 0,834 > korelasinya dari akar AVE semua variabel yaitu 0,402; 0,646; dan 0,415. Pada pengalaman usaha nilai akar AVE nya sebesar 0,861 > korelasinya dari akar AVE semua variabel yaitu 0,572 dan 0,650. Begitu juga dengan variabel kinerja UKM dan penggunaan informasi akuntansi. Sehingga dari hasil tersebut menunjukkan bahwa validitas diskriminan semua variabel penelitian telah terpenuhi.

Hasil Uji Reliabilitas

Hasil output SmartPLS composite reliability dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. Composite Reliability

Variabel Composite Reliability Keterangan

X1 0,994 Reliabel

X2 0,981 Reliabel

Y 0,970 Reliabel

Z 0,992 Reliabel

Sumber: Pengolahan data primer (kuesioner), 2025

Berdasarkan Tabel 4, seluruh konstruk dalam penelitian ini dinyatakan memenuhi kriteria reliabilitas. Hal ini dibuktikan dengan nilai composite reliability yang melebihi angka 0,70, sesuai dengan standar yang direkomendasikan.

Pengujian Model Struktural (Inner Model)

Hasil estimasi R Square dengan menggunakan SmartPLS

Tabel 5. Nilai R- Square

Variabel R Square

Y 0,295

Sumber: Pengolahan data primer (kuesioner), 2025

Tabel 5 Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SmartPLS, diperoleh nilai R-Square sebesar 0,295 pada variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Desa (Y). Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel Pola Komunikasi (X1), Gaya Kepemimpinan (X2), dan Tingkat Pendidikan (Z) mampu menjelaskan variasi Kinerja Keuangan Pemerintah Desa sebesar 29,5%, sedangkan sisanya sebesar 70,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pengujian Signifikansi dan Pengujian Hipotesis

Diperoleh hasil untuk pengaruh langsung dan tidak langsung yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6. Path Coefficients dan Specific Indirect Effects

Variabel Original Sample (O) Sample Mean (M) Standard Deviation (STDEV) T Statistics (| O/STDEV |) P Values

X1 > Y 0,084 0,086 0,113 0,741 0,459

X2 > Y 0,430 0,432 0,106 4,055 0,000

Z > Y -0,120 -0,128 0,090 1,337 0,182

X1 > Z > Y 0,328 0,324 0,138 2,384 0,018

X2 > Z > Y -0,271 -0,270 0,128 2,116 0,035

Sumber: Pengolahan data primer (kuesioner), 2025

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Transparansi Publik memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0,084 dengan nilai P-value sebesar 0,459 dan T-statistik sebesar 0,741. Nilai P-value yang lebih besar dari 0,05 dan T-statistik yang lebih kecil dari 1,96 menunjukkan bahwa Transparansi Publik tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa. Dengan demikian, hipotesis pertama ditolak.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Akuntabilitas memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0,430 dengan nilai P-value sebesar 0,000 dan T-statistik sebesar 4,055. Nilai P-value yang lebih kecil dari 0,05 dan T-statistik yang lebih besar dari 1,96 menunjukkan bahwa Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa. Dengan demikian, hipotesis kedua diterima.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Religiusitas Aparatur memiliki nilai koefisien jalur sebesar -0,120 dengan nilai P-value sebesar 0,182 dan T-statistik sebesar 1,337. Nilai P-value yang lebih besar dari 0,05 dan T-statistik yang lebih kecil dari 1,96 menunjukkan bahwa Religiusitas Aparatur tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa. Dengan demikian, hipotesis ketiga ditolak.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa interaksi antara Transparansi Publik dan Religiusitas Aparatur memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0,328 dengan nilai P-value sebesar 0,018 dan T-statistik sebesar 2,384. Nilai P-value yang lebih kecil dari 0,05 dan T-statistik yang lebih besar dari 1,96 menunjukkan bahwa Religiusitas Aparatur mampu memoderasi pengaruh Transparansi Publik terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa. Koefisien positif menunjukkan bahwa Religiusitas Aparatur memperkuat hubungan antara Transparansi Publik dan Kinerja Keuangan Pemerintah Desa. Dengan demikian, hipotesis keempat diterima.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa interaksi antara Akuntabilitas dan Religiusitas Aparatur memiliki nilai koefisien

jalur sebesar -0,271 dengan nilai P-value sebesar 0,035 dan T-statistik sebesar 2,116. Nilai P-value yang lebih kecil dari 0,05 dan T-statistik yang lebih besar dari 1,96 menunjukkan bahwa Religiusitas Aparatur mampu memoderasi pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa. Namun, koefisien jalur yang bernilai negatif menunjukkan bahwa Religiusitas Aparatur memperlemah hubungan antara Akuntabilitas dan Kinerja Keuangan Pemerintah Desa. Dengan demikian, hipotesis kelima diterima.

Pembahasan

Pengaruh Pola Komunikasi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola komunikasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah desa. Hal ini dibuktikan dengan nilai P-value sebesar 0,459 yang lebih besar dari 0,05 dan nilai T-statistik sebesar 0,741 yang lebih kecil dari 1,96.

Hasil tersebut mengindikasikan bahwa komunikasi yang terjadi di lingkungan pemerintah desa belum mampu memberikan kontribusi secara langsung terhadap peningkatan kinerja keuangan desa. Kondisi ini dapat disebabkan oleh komunikasi yang telah berjalan namun belum dimanfaatkan secara optimal dalam proses pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa pola komunikasi berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah desa ditolak.

Secara teoritis, komunikasi merupakan sarana untuk menyampaikan informasi, koordinasi, dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Namun, dalam pengelolaan keuangan desa, keberhasilan kinerja keuangan tidak hanya ditentukan oleh komunikasi, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap regulasi [8]. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian lain menyatakan bahwa komunikasi berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja organisasi. Dengan demikian, hipotesis pertama ditolak [9].

Temuan ini mengindikasikan bahwa komunikasi yang berlangsung dalam lingkungan pemerintah desa belum mampu memberikan pengaruh secara langsung terhadap peningkatan kinerja keuangan desa.

Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah desa. Hal ini dibuktikan dengan nilai P-value sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 dan nilai T-statistik sebesar 4,055 yang lebih besar dari 1,96. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin baik gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala desa, maka semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah desa. Kepemimpinan yang efektif mampu memberikan arahan, motivasi, dan pengawasan kepada aparatur desa sehingga pengelolaan keuangan desa dapat berjalan lebih baik. Dengan demikian, hipotesis kedua diterima. Hasil penelitian ini mendukung teori kepemimpinan yang menyatakan bahwa pemimpin memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas organisasi [10]. Selain itu, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian lain menyimpulkan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi [15]. Oleh karena itu, hipotesis kedua diterima.

Temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik gaya kepemimpinan yang diterapkan kepala desa, maka semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah desa.

Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah desa. Hal ini dibuktikan dengan nilai P-value sebesar 0,182 yang lebih besar dari 0,05 dan nilai T-statistik sebesar 1,337 yang lebih kecil dari 1,96. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan aparatur desa belum mampu memberikan pengaruh langsung terhadap kinerja keuangan pemerintah desa. Kinerja keuangan tidak hanya dipengaruhi oleh pendidikan formal, tetapi juga dipengaruhi oleh pengalaman kerja, pelatihan, dan kemampuan teknis yang dimiliki aparatur desa. Dengan demikian, hipotesis ketiga ditolak. Menurut Human Capital Theory, pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kemampuan individu. Akan tetapi, dalam praktik pengelolaan keuangan desa, pendidikan formal saja belum cukup tanpa didukung oleh pengalaman kerja, pelatihan, dan kemampuan teknis yang memadai. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian lain yang menemukan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa [24]. Dengan demikian, hipotesis ketiga ditolak.

Peran Tingkat Pendidikan dalam Memoderasi Pengaruh Pola Komunikasi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan mampu memoderasi pengaruh pola komunikasi terhadap kinerja keuangan pemerintah desa. Hal ini dibuktikan dengan nilai P-value sebesar 0,018 yang lebih kecil dari 0,05 dan nilai T-statistik sebesar 2,384 yang lebih besar dari 1,96. Koefisien jalur yang bernilai positif menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memperkuat hubungan antara pola komunikasi dan kinerja keuangan pemerintah desa. Semakin tinggi tingkat pendidikan aparatur desa, maka semakin efektif komunikasi yang dilakukan dalam mendukung peningkatan kinerja keuangan pemerintah desa. Dengan demikian, hipotesis keempat diterima.

Temuan ini menunjukkan bahwa aparatur desa yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung lebih mudah memahami informasi, arahan, dan kebijakan yang disampaikan melalui komunikasi organisasi. Kondisi tersebut membuat komunikasi menjadi lebih efektif dalam mendukung pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian lain yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan dapat memperkuat pengaruh faktor tata kelola terhadap pengelolaan keuangan desa [12]. Oleh karena itu, hipotesis keempat diterima. Peran Tingkat Pendidikan dalam Memoderasi Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan mampu memoderasi pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja keuangan pemerintah desa. Hal ini dibuktikan dengan nilai P-value sebesar 0,035 yang lebih kecil dari 0,05 dan nilai T-statistik sebesar 2,116 yang lebih besar dari 1,96. Namun, koefisien jalur yang bernilai negatif menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memperlemah pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja keuangan pemerintah desa. Hal ini menunjukkan bahwa aparatur desa yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung lebih mandiri dalam melaksanakan tugas sehingga ketergantungan terhadap gaya kepemimpinan menjadi lebih rendah. Dengan demikian, hipotesis kelima diterima.

Temuan ini mengindikasikan bahwa aparatur desa yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung lebih mandiri dalam melaksanakan tugas dan mengambil keputusan. Akibatnya, ketergantungan terhadap arahan pimpinan menjadi lebih rendah sehingga pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja keuangan desa menjadi berkurang. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian lain yang menyatakan bahwa karakteristik individu dapat memengaruhi efektivitas kepemimpinan dalam meningkatkan kinerja organisasi [16]. Dengan demikian, hipotesis kelima diterima, namun dengan arah moderasi yang memperlemah hubungan antara gaya kepemimpinan dan kinerja keuangan pemerintah desa.

VII. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh pola komunikasi dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja keuangan pemerintah desa dengan tingkat pendidikan sebagai variabel moderasi pada aparatur pemerintah desa di Kecamatan Beji, dapat disimpulkan bahwa pola komunikasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah desa. Sebaliknya, gaya kepemimpinan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah desa. Tingkat pendidikan juga tidak berpengaruh secara langsung terhadap kinerja keuangan pemerintah desa. Namun, tingkat pendidikan mampu memperkuat pengaruh pola komunikasi terhadap kinerja keuangan pemerintah desa serta memoderasi pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja keuangan pemerintah desa dengan arah hubungan yang memperlemah. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas gaya kepemimpinan menjadi faktor yang lebih dominan dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah desa dibandingkan pola komunikasi dan tingkat pendidikan secara langsung. Selain itu, tingkat pendidikan berperan dalam menentukan kuat atau lemahnya pengaruh pola komunikasi dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja keuangan pemerintah desa.

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah ruang lingkup penelitian yang hanya mencakup aparatur pemerintah desa di Kecamatan Beji sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan secara luas. Selain itu, data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner yang bergantung pada persepsi dan pemahaman responden. Penelitian ini juga hanya memfokuskan pada variabel pola komunikasi, gaya kepemimpinan, dan tingkat pendidikan, sehingga masih terdapat faktor-faktor lain yang berpotensi memengaruhi kinerja keuangan pemerintah desa namun belum dianalisis dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang relevan agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Doa, dukungan, serta motivasi dari berbagai pihak memiliki peran yang sangat besar dalam proses penyusunan skripsi ini hingga selesai sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak.) pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, ayah dan ibu, serta adik penulis yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, motivasi, serta bantuan baik secara moral maupun material sehingga penulis dapat menempuh pendidikan hingga jenjang sarjana dan menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
2. Seluruh teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan, bantuan, semangat, dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Daftar Pustaka

- [1]A. Azizah, S. Sulisty, and R. I. Mustikowati, "Pengaruh Perencanaan Desa, Penerapan Akuntansi Desa dan Pengendalian Internal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa," J. Akunt. Neraca, vol. 2, no. 2, pp. 1–6, 2025, doi: 10.59837/jan.v2i2.387.
- [2]W. Java, "Sosyoekonomi Determinants of Accountability for The Management of Funds Vis- À -Vis Village Governments in Indonesia (Empirical Case in," vol. 31, no. 56, pp. 191–204, 2023, doi: 10.17233/sosyoekonomi.2023.02.09.
- [3]D. Rulyanti, R. A. Sularso, F. Ekonomi, and U. Jember, "Desa Sebagai Variabel Intervening," vol. 11, no. 3, pp. 323–335, 2017.
- [4]Antari, "MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH," vol. 7, no. 2, pp. 1080–1110, 2018.
- [5]Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, "Prioritas Penggunaan Dana Desa 2025 Fokus Ketahanan Pangan dan Kemiskinan," 2024. [Online]. Available: <https://kemendes.go.id/berita/view/detil/5704/kemendes-prioritas>.
- [6]Achmad and Misnaini, "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Duwet Panarukan Situbondo," Al-Idarah J. Manaj. dan Bisnis Islam, vol. 2, no. 2, pp. 45–58, 2021, doi: 10.35316/idarrah.2021.v2i2.45-58.
- [7]L. Yunita Sari, Nelly Masnila, and Desi Indriasari, "Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Desa, dan Integritas Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Jayaloka, Kabupaten Musi Rawas," JEMSI (Jurnal Ekon. Manajemen, dan Akuntansi), vol. 10, no. 5, pp. 2874–2878, 2024, doi: 10.35870/jemsi.v10i5.3086.
- [8]M. S. Yusnita and R. Gusrianisa, "Peran Teknologi dalam Meningkatkan Pola Komunikasi dan Dampaknya terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Desa Cikole," J. Adm. Kant., vol. 13, no. 1, pp. 86–100, 2025, [Online]. Available: <https://ejournal-binainsani.ac.id/index.php/JAK/article/view/3438>
- [9]G. P. Vian and H. A. T. Sugianto, "Analisis Dampak Kepemimpinan Dan Komunikasi Terhadap Kinerja Karyawan DPMPSTP Di Kabupaten Perbatasan," RIGGS J. Artif. Intell. Digit. Bus., vol. 4, no. 2, pp. 3001–3012, 2025, doi: 10.31004/riggs.v4i2.965.
- [10]M. Rosalina and L. N. Wati, "Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Karyawan," J. Ekobis Ekon. Bisnis Manaj., vol. 10, no. 1, pp. 18–32, 2020, doi: 10.37932/j.e.v10i1.26.
- [11]W. Purnamasari, L. D. A. Indrayanti, and N. L. Fitriya, "Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Komunikasi Internal dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Perusahaan," INOBIJ. Inov. Bisnis dan Manaj. Indones., vol. 2, no. 2, pp. 193–205, 2019, doi: 10.31842/jurnal-inobis.v2i2.84.
- [12]R. L. Puspitasari, D. D. Astuti, and W. F. Ningsih, "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Efektivitas Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dengan Tingkat Pendidikan Sebagai Variabel Moderasi Di Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan," Riemba - J. Ris. Ekon. Manajemen, Bisnis Dan Akunt., vol. 1, no. 1, pp. 121–134, 2023, doi: 10.31967/riemba.v1i1.941.
- [13]Eko Raharjo, "TEORI AGENSI DAN TEORI STEWARSHIP DALAM PERSPEKTIF AKUNTANSI (Agency," Enterp. Risk Manag., pp. 31–41, 2020.
- [14]A. Aman-Ullah, W. Mehmood, S. Amin, and Y. A. Abbas, "Human capital and organizational performance: A moderation study through innovative leadership," J. Innov. Knowl., vol. 7, no. 4, p. 100261, 2022, doi: 10.1016/j.jik.2022.100261.
- [15]S. Nur Azizah, R. Rahmawati, Rusliandy, C. Wahyudin, and N. Anak Lydon, "Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai," J. Governansi, vol. 10, no. 1, pp. 1–14, 2024, doi: 10.30997/jgs.v10i1.11009.
- [16]M. Shodikin et al., "Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Moderasi the Influence of the Village Head ' S Leadership Style and Competence on Village Officials Officials on the Performance of Village Officials With Job

Satisfaction As a Moderating Variable," vol. 50, no. 2, pp. 190–206, 2024, doi: 10.33701/jipwp.v50i2.4691.

[17]S. Kurnianto, K. Prasetyo, A. A. G. S. Utama, C. Angelina, and A. S. Rahmani, "jenis jenis peneltian," *Cogent Bus. Manag.*, vol. 13, no. 1, Dec. 2026, doi: 10.1080/23311975.2025.2611643.

[18]D. Assayakurrohim, D. Ikhrum, R. a Sirodj, and M. W. Afgani, "Jurnal pendidikan sains dan komputer metode studi kasus dalam penelitian kualitatif jurnal pendidikan sains dan komputer," *J. Pendidik. sains dan Komput.*, vol. 3, no. 1, pp. 1–9, 2023.

[19]H. Sihotang, "H. Sihotang, Metode Penelitian Kuantitatif. 2023."

[20]A. A. N. Gunawan, I. W. Suharta, and I. B. M. Suryatika, *Di Era Digital : Mutiara Intelektual Indonesia*.

[21]Z. Haoxing and C. System, SUGIONO.

[22]P. P. Asih and I. Raharja, "Peran Kepemimpinan dan Komunikasi terhadap Kinerja Karyawan di Kantor Desa Serang Kabupaten Bekasi Program Studi Manajemen , Fakultas Ekonomi dan Bisnis , Universitas Bina Sarana Informatika , dalam mencapai tujuannya . Efektivitas kerja karyawan dipengar," vol. 5, no. 2, pp. 1165–1176, 2025.

[23]Y. Rachawati, "Pendidikan karakter melalui metode pembelajaran," pp. 1–10, 2018.

[24]Refky Tooy, Harun Blongkod, and Ikhlas UL Aqmal, "Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa: Studi pada Desa-desa di Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo," *Al-Kharaj J. Ekon. Keuang. Bisnis Syariah*, vol. 7, no. 5, pp. 1534–1545, 2025, doi: 10.47467/alkharaj.v7i5.7156.

[25]Fatimah, "Fatimah and Nuryaningsih Buku Ajar ,2018".